

MASA DEPAN IBU KOTA NUSANTARA: PEMBELAJARAN DARI PENDIRIAN IBU KOTA BRASÍLIA

THE FUTURE OF NUSANTARA CAPITAL: LESSON LEARNED FROM BRASÍLIA

Gufron Gozali, Zulmi Zuliansyah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: gufrongozali1979@gmail.com

ABSTRACT

President Jokowi's decision to relocate Indonesia's capital from Jakarta to Nusantara is underpinned by two primary considerations: the deteriorating livability of Jakarta and a strategic initiative to mitigate regional disparities. This decision has ignited extensive debate among the public and scholars, focusing on the social, economic, and environmental ramifications of the move. Brazil's experience with Brasília is often cited as a reference point. However, our research indicates that the economic growth in Brasília, one of the government's key indicators, has not been effective in significantly reducing regional disparities. Employing qualitative methodology and secondary data, this study leverages theories of sustainable development and economic disparity to provide a deeper interpretation of the findings. The article aims to evaluate the potential of capital relocation to diminish economic disparities between regions and to assess the relevance of Brasília's relocation as a model. Unlike other capital relocations, which are typically driven by political, economic, or administrative motives and supported by comprehensive planning, the relocation of Indonesia's new capital (IKN) must commence from the foundational level, akin to Brasília's experience. Furthermore, the proposed financing scheme poses a potential economic burden on the nation.

Keywords: Indonesia, Brazil, IKN, Brasília

ABSTRAK

Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara didasarkan pada dua pertimbangan utama: kondisi Jakarta yang tidak layak huni dan upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Keputusan ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi, yang menyoroti implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemindahan tersebut. Salah satu negara yang dijadikan acuan adalah Brasil. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa salah satu indikator yang digunakan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi di ibu kota Brasília, tidak terbukti efektif, dan ibu kota Brasília tidak secara substansial mengurangi disparitas regional di sekitarnya. Menggunakan metodologi kualitatif dan mengandalkan data sekunder, penelitian ini memanfaatkan teori pembangunan berkelanjutan dan disparitas ekonomi untuk menginterpretasikan temuan secara lebih mendalam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemindahan ibu kota dapat mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, serta menilai apakah pemindahan ibu kota Brasília dapat dijadikan acuan yang relevan. Berbeda dari beberapa pemindahan ibu kota lainnya yang umumnya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, atau administratif dan didukung oleh perencanaan yang komprehensif. Proses pemindahan IKN harus dimulai dari tahap dasar, mirip dengan pemindahan ibu kota Brasília. Selain itu, skema pembiayaan yang diterapkan berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi negara

Kata Kunci: Indonesia, Brazil, IKN, Brasília

PENDAHULUAN

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan telah menjadi wacana yang berlangsung dalam waktu yang lama. Wacana yang semula terbatas pada diskusi konseptual ini kini

diaktualisasikan oleh pemerintah Jokowi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta pengintegrasian proyek pembangunan ibu kota baru dalam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Saputra dkk, 2021). Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Menteri PPN periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah fenomena baru dalam konteks sejarah peradaban dunia (Parulihan, 2019; Mulyaningrum, 2023). Selama seratus tahun terakhir, terdapat sekitar tiga puluh kali pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh berbagai negara di seluruh dunia (Parulihan, 2019). Beragam alasan mendorong dilakukannya pemindahan ibu kota, termasuk keinginan pemerintah untuk menciptakan ibu kota yang netral secara politik dan ekonomi, mengatasi permasalahan lingkungan, menghadirkan simbol kemerdekaan negara yang baru, mempertahankan kekuasaan suatu rezim, serta mengejar unifikasi atau penyatuan entitas politik dalam suatu negara yang sebelumnya terfragmentasi (Illman, 2015).

Sebagai ilustrasi, di Asia Tenggara terdapat dua negara yang pernah melaksanakan pemindahan ibu kota, yaitu Malaysia dan Myanmar. Namun, tujuan dari pemindahan ibu kota di masing-masing negara tersebut sangat bertolak belakang. Pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, bertujuan untuk memindahkan pusat administrasi pemerintahan negara (Amal & Sulistyawan, 2022). Di sisi lain, Kuala Lumpur tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, seni, media, dan sektor-sektor lain (Betria & Raju, 2018). Berbeda dengan itu, Myanmar melakukan pemindahan ibu kota dengan pembangunan kota baru yang dinamakan Naypyidaw. Meskipun pemerintah Myanmar mengklaim bahwa pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi negara (Myoe, 2006), terdapat bukti yang menunjukkan bahwa langkah tersebut lebih merupakan strategi politik dan keamanan junta militer Myanmar untuk melindungi kekuasaan mereka dari gerakan oposisi dan pemberontakan (Campante dkk., 2019).

Sementara itu, pemindahan ibu kota Jerman bertujuan untuk unifikasi atau penyatuan entitas politik yang sebelumnya terbagi menjadi dua

negara, yaitu Jerman Barat dengan ibu kota di Bonn dan Jerman Timur dengan ibu kota di Berlin (Rosenberg, 2019). Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, Parlemen Jerman akhirnya menyepakati Berlin sebagai satu-satunya ibu kota negara, yang juga berfungsi sebagai simbol bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur yang sebelumnya dipisahkan oleh ideologi yang berbeda (Rosenberg, 2019). Sebaliknya, Brasil memindahkan ibu kota negara mereka dengan alasan utama untuk pengembangan wilayah, selain mengatasi berbagai permasalahan perkotaan di ibu kota sebelumnya (Kelly, 2020). Namun, perpindahan ini lebih dipicu oleh janji politik yang disampaikan oleh Kubitschek selama masa kampanye untuk terpilih sebagai presiden, yang diucapkan tanpa didukung oleh studi mendalam sebagai landasan yang kuat (Epstein, 1973). Alasan-alasan pemindahan ibu kota yang telah disebutkan menunjukkan bahwa setiap negara melakukan pemindahan ibu kota dengan berbagai macam alasan yang berbeda, sesuai dengan konteks kebutuhan dan urgensi masing-masing negara.

Sejalan dengan praktik yang diadopsi oleh negara-negara lain yang telah lebih dahulu memindahkan ibu kota, keputusan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan didasari oleh berbagai pertimbangan strategis. Dua alasan utama dari pemindahan ini adalah upaya untuk mengurangi disparitas wilayah, terutama dalam konteks ekonomi dan infrastruktur antara Pulau Jawa dan daerah di luar Jawa (Farida, 2021). Adanya ketimpangan yang signifikan dalam laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara kedua wilayah tersebut tidak dapat dipungkiri (Populicenter, 2021). Ketimpangan ini telah berlangsung sejak era pra-kolonial dan terus berlanjut hingga pasca-kemerdekaan (Rinardi dkk., 2023). Dalam rangka mengatasi disparitas wilayah yang mencolok ini, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai solusi, salah satunya adalah pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur (Bappenas, 2021).

Adapun alasan kedua dikarenakan ketidakmampuan Jakarta untuk terus menjadi ibu kota negara disebabkan berbagai permasalahan, seperti masalah overpopulasi, masalah polusi dan lingkungan yang semakin parah, dan kemacetan yang tidak ada habisnya (Yusuf dkk., 2023). Menurut laporan *Department of Economic and Social Affairs United Nations* (2018), 55% populasi dunia tinggal di area urban, dengan proyeksi peningkatan menjadi 68% pada tahun 2050 (Department of Economic and Social Affairs, 2015). Tren serupa terlihat di Indonesia, di mana pada tahun 2020, 56,7% penduduk tinggal di perkotaan, dan angka ini diperkirakan mencapai 66,6% pada tahun 2035 (BPS, 2020). Urbanisasi ini berimplikasi pada peningkatan kepadatan penduduk dan beban lingkungan yang semakin berat, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan kota-kota terhadap krisis ekologis.

Kajian terhadap hasil dan proses pemindahan ibu kota negara lain sangat penting untuk memahami berbagai aspek, termasuk besaran biaya, risiko, keuntungan, dan evaluasi yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Pemahaman ini dapat berkontribusi pada upaya meminimalisasi potensi kerugian dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia di masa mendatang. Dalam buku saku mengenai pemindahan ibu kota yang diterbitkan oleh Bappenas (2021), terdapat sub-bab yang membahas pembelajaran dari pengalaman pemindahan ibu kota di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh yang signifikan adalah Brasil, yang berhasil memindahkan ibu kotanya dengan mendirikan kota baru dari awal (Skidmore, 1999). Brasil sukses memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro, sebuah kota di wilayah timur, ke Brasília, yang terletak di wilayah tengah negara (Quistorff, 2015). Pemindahan ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Brasil, tetapi juga untuk memutuskan ikatan negara tersebut dengan masa kolonial yang kelam (Mahatma, 2022). Upaya pemindahan ibu kota yang diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Kubitschek berfungsi sebagai simbol era baru Brasil, yang berupaya mengatasi berbagai masalah fundamental, termasuk kemiskinan,

rasisme, kesenjangan kelas, dan korupsi (Kelly, 2020: 73).

Namun, yang sering kali terabaikan dalam megahnya pembangunan ibu kota baru Brasil adalah bahwa pemindahan ibu kota tersebut membawa berbagai dampak negatif bagi negara dan masyarakatnya. Beragam permasalahan, seperti beban biaya yang tinggi, pengusuran masyarakat adat, deforestasi, serta kesenjangan pendapatan antara warga Brasília dan wilayah Brasil lainnya, masih terus menghantui eksistensi ibu kota Brasília hingga saat ini (Casado, 2021; Lima & Cristovao, 2013; WRM, 2023; Wulandari & Koestoer, 2023). Munculnya permasalahan ini mendorong artikel ini untuk mengeksplorasi masa depan pembangunan IKN dengan merujuk pada proses pembangunan serta tantangan yang dihadapi Brasil saat memindahkan ibu kotanya. Selain itu, terdapat sejumlah kesamaan antara pemindahan ibu kota Indonesia dan Brasil, yang menjadikan Brasil sebagai salah satu model studi kasus terkait pemindahan ibu kota negara (Bappenas, 2021; Parulihan, 2019). Oleh karena itu, selain mencermati motivasi di balik pemindahan ibu kotanya, konsep perencanaannya, dan perkembangan Brasília saat ini, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pemindahan ibu kota Brasil, yang dalam beberapa temuan penelitian dalam artikel ini, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak signifikan dalam mengurangi kesenjangan wilayah maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Brasil.

Sejak ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perdebatan mengenai pengembangannya terus berlangsung di berbagai tempat dan acara, terutama pada saat proses pemilihan presiden 2024-2029 berlangsung (Mae, 2023). Pemerintah Indonesia melalui kementerian PPN, menekankan bahwa pemindahan ibu kota baru bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban dunia, khususnya dalam kurung waktu dua abad terakhir (Parulihan, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian Campante dkk (2019) yang melihat bahwa salah satu alasan pemindahan ibu kota berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meminimalisasi gelombang revolusi. Sementara Illman (2015), menunjukkan bahwa setidaknya terdapat lima alasan utama pemindahan ibu

kota, yakni pembangunan negara, pemerataan pembangunan daerah, menghadapi ancaman pemberontakan, menghindari permasalahan di ibu kota sebelumnya, dan keputusan pemimpin negara.

Mengingat bahwa pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang telah terjadi di beberapa negara lain, maka penting untuk melihat bagaimana dampak pemindahan ibu kota negara lain, baik terhadap perkembangan negaranya maupun terhadap masyarakatnya. Rachmawati dkk (2021) dalam penelitian mereka, menyimpulkan bahwa pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw di Myanmar dan pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya bisa disebut sebagai praktik terbaik dalam pembangunan ibu kota yang mendorong aktivitas baru dalam pembangunan daerah lainnya. Hal yang sama juga diamini oleh Betria dan Raju (2018) yang menyimpulkan bahwa masyarakat Malaysia cenderung positif terhadap keputusan perpindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Salah satu alasannya karena untuk menanggulangi kemacetan. Namun, kendala yang harus dihadapi masyarakat adalah pengelolaan administrasi memerlukan waktu yang lama. Lebih lanjut, Penelitian Sumarno (2020) menekankan bahwa terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pemindahan ibu kota yang terjadi di Malaysia, yakni pemisahan ibu kota negara dengan pusat pemerintahan. Kedua, ibu kota baru tetap mempresentasikan ideologi nasional dan identitas bangsa. Ketiga, mekanisme pembiayaan tidak menggadaikan negara kepada asing. Keempat, lebih mengutamakan potensi nasional dan jati diri bangsa, dan terakhir, pemindahan ibu kota adalah program pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan bertahap dan tidak memaksakan di luar batas kemampuan negara.

Sementara itu, Wulandari & Koestoer (2023) melalui penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun terdapat perbedaan anggaran dan pelaksanaan, Indonesia dan Brazil memiliki alasan yang sama untuk memindahkan ibu kotanya, sehingga Indonesia perlu memperhatikan dampak perpindahan tersebut terhadap aspek lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian Mubaroq dan Solikin (2019) menekankan bahwa dari hasil

penelusuran terhadap pemindahan ibu kota di Brazil, Tanzania, dan Malaysia, kombinasi skema tradisional (melalui anggaran negara) dan skema *business to government* dinilai sebagai skema pembiayaan yang paling tepat untuk mewujudkan pelaksanaan pemindahan ibu kota ke daerah baru. Adapun proporsi yang ideal bisa berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memandang masing-masing fungsi infrastruktur yang ada. Selain itu, keseriusan kepala negara juga menjadi penentu keberhasilan proyek ini.

Pada akhirnya, menurut Herdiawan (2021), rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan tujuan mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata dan berkelanjutan serta memberikan harapan pemerataan ekonomi, haruslah memperhatikan aspek-aspek dalam pembangunan ruang perkotaan baru. Hal ini karena menurutnya, sepanjang sejarahnya, pembangunan ruang perkotaan umumnya menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar dan menyebabkan krisis ekonomi. Berbeda dengan Herdiawan (2021), Saputra dkk (2021) menekankan pentingnya pemindahan ibu kota untuk mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan membentuk sistem baru yang memiliki instrumen pertahanan nir-militer (*bargaining power*) serta IKN haruslah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum. Jangan sampai, IKN tidak berkontribusi untuk pemerataan pembangunan dan solusi kesenjangan infrastruktur maupun manusia seperti halnya yang terjadi di Brasilia, di mana ibu kota baru tersebut tidak mampu menjadi solusi kesenjangan yang terjadi di Brazil (De Sousa Filho dkk., 2022; Grimes dkk., 2017).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, aspek spesifik yang terkait dengan dampak pemindahan ibu kota terhadap pengurangan disparitas ekonomi serta perbandingan dengan Brasilia masih belum diteliti secara memadai. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan perhatian pada alasan di balik pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan. Selain itu, studi-studi tersebut juga membandingkan

keberhasilan pemindahan ibu kota yang dilaksanakan oleh Malaysia dan Myanmar. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekurangan yang ada dengan menganalisis sejauh mana pemindahan ibu kota dapat mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, serta menilai apakah pemindahan ibu kota Brasília dapat dijadikan acuan yang relevan.

Artikel ini menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dan teori disparitas ekonomi untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki beragam interpretasi terkait makna, definisi, dan tujuan dari berbagai pendekatan ilmiah (Waas dkk., 2011; Hopwood dkk., 2005). Namun, di antara berbagai definisi terkait konsep tersebut, definisi yang paling sering dirujuk berasal dari laporan Komisi Brundtland (1987) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Emas, 2015; Mensah, 2019: 6). Definisi ini menyoroti tanggung jawab antar-generasi dalam mempertimbangkan konsekuensi tindakan saat ini (Fischer dkk., 2023). Selain itu, laporan tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan tantangan ekologis dengan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, mengingat keduanya memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekologis (Fischer et al., 2023: 17–18).

Definisi pembangunan berkelanjutan yang diusulkan oleh Komisi Brundtland berupaya menjembatani perdebatan mengenai konsepsinya, dengan menekankan prioritas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Hopwood dkk., 2005: 40). Kelonggaran dan ambiguitas dalam konsep ini memungkinkan partisipasi dunia usaha dan pemerintah dalam penerapan keberlanjutan tanpa menghadapi pembatasan yang ketat (Hopwood dkk., 2005: 40). Namun, konsepsi ini juga menuai kritik karena dianggap kontradiktif dan kurang berpihak (Blewitt, 2017; Muthmainnah dkk., 2020). Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan tetap dianggap sebagai pendekatan paling realistis

dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial global, sembari terus mengejar pertumbuhan ekonomi (Muthmainnah dkk., 2020: 26).

Secara lebih spesifik, konsep pembangunan berkelanjutan berlandaskan tiga pilar utama: ekologi, sosial, dan ekonomi (Purvis dkk., 2019). Hubungan antar pilar ini dijelaskan dalam kerangka *triple bottom line* (Klarin, 2018). Interaksi ketiga pilar mencakup: 1) Keberlanjutan ekologi – upaya menjaga kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kualitas hidup; 2) Keberlanjutan sosial – pelestarian masyarakat dan identitas budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman, serta perlindungan hak asasi manusia; dan 3) Keberlanjutan ekonomi – mempertahankan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai pendapatan dan standar hidup yang layak. Ketiga pilar tersebut harus selalu seimbang dan berkesinambungan, untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang optimal (Klarin, 2018: 84–85).

Sebagai negara yang turut mengadopsi Resolusi Sidang Umum PBB A/RES/70/1 *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015 (Yanti Fristikawati dkk., 2022), Indonesia berkewajiban untuk menerapkan program dan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam segala bentuk proyek pembangunannya, termasuk proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan sangat tepat untuk menjadi alat analisis dari permasalahan yang dikaji dalam artikel ini khususnya dari segi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, kajian terkait disparitas ekonomi dimulai dari penelitian yang berjudul *Economic Growth and Income Inequality* dari Simons Kuznets (1955). Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa disparitas ekonomi akan menurun dengan sendirinya jika proses pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Secara spesifik, menurut Todaro dan Smith (2012), pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan cepat tidak selalu berimplikasi pada pemerataan pendapatan di masyarakat. Lebih lanjut, tingginya ketimpangan dalam pendapatan per kapita dapat secara langsung

menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara spesifik, tingginya PDRB di suatu wilayah berkontribusi secara langsung terhadap tingkat ketimpangan di daerah tersebut. Kedua, faktor Upah Minimum Provinsi juga memainkan peranan penting. Selama ini, upah minimum cenderung mengalami stagnasi, padahal peningkatan upah minimum berpotensi menurunkan tingkat ketimpangan. Ketiga, produktivitas tenaga kerja menjadi variabel krusial. Kemampuan pekerja dalam memproduksi barang tertentu dalam rentang waktu tertentu berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Apabila produktivitas pekerja dapat ditingkatkan, maka ketimpangan di wilayah tersebut dapat diminimalkan. Keempat, perbedaan investasi antarwilayah di Indonesia turut memengaruhi ketimpangan. Variasi dalam distribusi atau alokasi investasi memiliki dampak langsung terhadap pendapatan per kapita masyarakat di masing-masing daerah.

Dengan mengintegrasikan teori Pembangunan Berkelanjutan dan Disparitas Ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kompleksitas kebijakan pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi tujuan utama dari kebijakan tersebut, yaitu untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi beban di Jakarta, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, serta implikasi sosial yang dihasilkan oleh kebijakan yang ambisius ini. Melalui pendekatan dua teori ini, kami berupaya untuk mengidentifikasi apakah pemindahan ibu kota negara secara efektif dapat mengatasi disparitas ekonomi yang telah mengakar di Indonesia, ataukah langkah ini berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru.

MEMAHAMI DAMPAK DI BALIK PEMINDAHAN IBU KOTA BRASÍLIA

Tema yang sering muncul dalam diskursus pembangunan ibu kota baru adalah upaya untuk mengubah dan mengendalikan lingkungan alam. Proses pembangunan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang memadai, terutama pada lahan-lahan yang rentan atau ekosistem yang rapuh, serta di bawah kondisi iklim yang ekstrem. Tipe lahan yang digunakan untuk pembangunan ini bervariasi, mencakup rawa, dataran banjir, hutan, bukit pasir, dan padang rumput yang tandus. Sebagai ilustrasi, dalam kasus Brasília, sekitar 73 persen dari sabana yang dikenal sebagai *cerrado* dalam bahasa Portugis telah mengalami kerusakan signifikan akibat pembangunan gedung-gedung pemerintah, kawasan bisnis, perumahan, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur transportasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi ibu kota baru tersebut (WRM, 2023).

Proyek ibu kota Brasília juga memicu proses penggundulan hutan yang luas baik secara langsung maupun tidak langsung (Hance, 2020). Misalnya saja, pembangunan jalan raya Transbrasiliana yang menghubungkan Brasília dengan kota Amazon Belém, ibu kota negara bagian Pará untuk menghubungkan Brasília dengan berbagai negara bagian federasi memainkan peran penting dalam peningkatan deforestasi di Brazil (Hance, 2020; WRM, 2023). Selain penghancuran area hutan yang cukup luas dan signifikan untuk membangun jalan sepanjang 2.000 km ini, konstruksinya juga membuka bagian timur wilayah Amazon, yang bersumbangsih terhadap terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat setempat dan kegiatan perusakan, termasuk ekstraksi kayu, peternakan, munculnya perkebunan kedelai dan monokultur lainnya di tanah masyarakat adat (Andrade, 2019).

Salah satu pilar yang menjadi alasan dalam pemindahan ibu kota Brazil adalah bahwa ibu kota baru tersebut akan menjadi tanah impian dan peluang baru bagi rakyat Brazil (Shoumatoff, 1990). Gagasan tersebut mengindikasikan bahwa terlepas dari apa pun kelas sosialnya, semua masyarakat akan dapat berbagi ruang yang sama.

Jadi, mewujudkan impian ibu kota baru juga berarti mewujudkan impian negeri baru yang berkeadilan dan setara. Presiden Juscelino Kubitschek, dengan ambisinya untuk memodernisasi Brazil, mengidentifikasi kebutuhan akan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Untuk mewujudkan ambisi ini, Kubitschek meluncurkan kebijakan *Fifty Years in Five*, yang merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan yang idealnya membutuhkan waktu 50 tahun menjadi lima tahun (Kelly, 2020).

Meskipun demikian, janji tersebut pada akhirnya hanya merupakan serangkaian harapan belaka. Konstruksi Brasília menghancurkan dan mengurangi cakupan tanah dan vegetasi *cerrado*, tempat di mana komunitas Quilombola dan masyarakat adat lainnya yang telah menempati dan menggantungkan kelangsungan hidup mereka sejak dahulu. Sembilan tahun setelah ibu kota diresmikan, sekitar 79.000 orang tinggal di 14.600 tenda berserakan di sekitar Brasília, yang merupakan para penduduk Brazil yang mencoba mengadu nasib di ibu kota baru (WRM, 2023). Dalam upaya untuk menghentikan migrasi besar-besaran tersebut, pemerintah mulai memindahkan orang-orang dari kamp tenda tersebut ke area terpisah, salah satunya adalah unit administrasi baru yang disebut Ceilandia. Proses tersebut oleh para pengamat perkotaan, dianggap sama seperti kebijakan rasial apartheid di Afrika Selatan (WRM, 2023).

Dalam konteks ketimpangan sosial di Brasil, Brasília menunjukkan tingkat kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di negara tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2018, pendapatan rumah tangga bulanan penduduk di Lago Sul mencapai R\$ 7.654,91 (Ferrari, 2020). Sebaliknya, di lingkungan Cidade Estrutural, yang merupakan daerah termiskin di Distrik Federal dan terletak hanya 15 km dari Lago Sul, pendapatan rata-rata bulanan penduduknya tercatat sebesar R\$ 485,97. Angka ini mencerminkan perbedaan yang mencolok, di mana pendapatan di Cidade Estrutural mencapai 16 kali lebih rendah dibandingkan dengan Lago Sul (Ferrari, 2020). Kondisi yang kontras ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh penduduk Estrutural, yang harus berjuang

setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Fasilitas transportasi yang terbatas dan biaya yang tinggi untuk mencapai tempat kerja memperburuk situasi mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap kebutuhan fundamental seperti makanan yang terjangkau, air bersih, energi, sanitasi, dan layanan kesehatan (Ferrari, 2020).

MEMAHAMI SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA BRASÍLIA

Seperti halnya pembangunan IKN di Indonesia, pembangunan Brasília sebagai ibu kota Brasil juga dimulai dari titik nol. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Brasília merupakan kota yang sepenuhnya baru, yang terletak di tengah hutan tropis. Oleh karena itu, seluruh infrastruktur dan fasilitas pendukung perlu dirancang dan dibangun terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan serta fungsionalitas kota tersebut (Mubaroq & Solikin, 2019). Dinamika pemindahan ibu kota ini sangat dipengaruhi oleh visi Presiden Juscelino Kubitschek, melalui dokumen strategis yang dikenal sebagai Plano de Metas, pemerintah Kubitschek menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan ambisius tersebut (Mubaroq & Solikin, 2019).

Di tengah ambisi besar untuk menciptakan sebuah pusat pemerintahan yang modern dan terencana, pembiayaan pembangunan ibu kota Brasília menelan biaya yang sangat besar. Meskipun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Brazil untuk pembangunan ibu kota Brasília. Namun, diperkirakan total biaya pembangunan ibu kota Brasília berkisar antara 400 hingga 600 juta dollar Amerika, yang setara dengan 2-3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Brasil pada waktu itu (Gordon 2006). Sementara itu, Eugênio Gudin, ekonom sekaligus mantan menteri keuangan di pemerintahan Café Filho memperkirakan biaya pembangunan Brasília bernilai US\$ 1,5 miliar pada tahun 1960, ketika kota tersebut diresmikan (Pinto, 2020). Jumlah tersebut, jika diperbaharui berdasarkan akumulasi inflasi AS selama 60 tahun terakhir (hingga pada tahun 2020) bernilai sebesar US\$

13 miliar, atau R\$ 68 miliar. Mungkin terlihat kecil, namun jika dilihat dengan membandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Brasil pada saat itu yang sebesar US\$15 miliar atau setara 10 persen dari total PDB Brazil tahun 2019, maka konstruksi ibu kota Brazil pada masa pemerintahan Juscelino Kubitschek (1956-1961) menghabiskan dana kurang lebih R\$ 730 miliar pada tahun (Pinto, 2020).

Temuan lain menunjukkan biaya pembangunan Brasília, yang dimulai sejak tahun 1960 diperkirakan senilai US\$ 1,5 miliar atau setara dengan jumlah sekitar US\$ 13 miliar saat ini, yang nilainya mencapai R\$ 70 miliar real Brasil. Angka ini terlihat seperti jumlah yang relatif kecil. Namun, jika dibandingkan dengan produk nasional bruto (GNP) tahun 1960, membangun Brasília kira-kira menghabiskan 10 persen anggaran nasional kala itu. 10 persen dari GNP hari ini akan bernilai sekitar US\$ 140 miliar atau R\$ 750 miliar, jumlah yang jauh lebih besar lagi. Meskipun, jumlah sebesar itu masih belum memberikan gambaran biaya lengkap karena banyak pekerjaan konstruksi di Brasília dilakukan setelah tahun 1960.

Seluruh dana yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota Brasília berasal dari anggaran pemerintah Brasil. Pendanaan ini dilakukan melalui berbagai skema, termasuk penerbitan mata uang dan pinjaman, dengan memastikan bahwa tidak ada investasi asing yang terlibat (Mubaroq & Solikin, 2019). Besarnya biaya yang diperlukan untuk membiayai ibu kota baru menyebabkan pemerintah Brasil menghadapi kesulitan dalam merealisasikan proyek ambisius tersebut. Situasi ini diperparah oleh aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik, namun tidak memadai untuk mencapai tingkat investasi yang dibutuhkan Brasil (Skidmore, 1999: 146–147). Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, solusi yang diusulkan adalah penerbitan mata uang untuk membiayai defisit sektor publik dan pinjaman (Mubaroq & Solikin, 2019; Skidmore, 1999: 146–147). Namun, pendekatan ini terbukti kurang efektif, karena pertumbuhan ekonomi Brasil semakin bergantung pada modal asing dalam jumlah besar, yang berujung pada peningkatan utang luar negeri

dan inflasi yang merajalela (Kelly, 2020: 73-74). Lebih lanjut, kondisi ini mengakibatkan Brasil memasuki periode ketidakstabilan ekonomi dan politik, yang menjadi cikal bakal terjadinya kudeta militer pada tahun 1964 dan membuka jalan bagi pemerintahan diktator yang berkuasa hingga tahun 1985 (Kelly, 2020: 74; Ling, 2019; Skidmore, 1999: 147–148).

MEMBUKTIKAN KEMAMPUAN BRASÍLIA DALAM MENGATASI DISPARITAS EKONOMI DAN SOSIAL DI BRASIL

Pemindahan ibu kota di Indonesia dan Brazil menunjukkan banyak kesamaan yang signifikan. Kedua negara berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh ibu kota lama mereka, seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan pembangunan (Wulandari & Koestoer, 2023). Dari segi lokasi, ibu kota baru di kedua negara dipindahkan ke wilayah yang masih memiliki hutan hujan tropis dan terletak di bagian tengah negara, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata (De Vries, 2021). Maka, tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia dan Badan Otorita IKN menjadikan pemindahan ibu kota Brasília sebagai salah satu acuan dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia (Sugiarto, 2022). Pendirian Brasília dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai contoh yang baik, menunjukkan bahwa proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota baru dapat menjadi pemicu pembangunan yang lebih adil dan merata, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur yang selama ini mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan Pulau Jawa (Anditya & Khairuummah, 2022; Bappenas, 2021).

Meskipun demikian, muncul pertanyaan krusial, apakah pembangunan Brasília benar-benar berhasil mengurangi disparitas wilayah di Brasil. Ketika melihat tingkat pendapatan per daerah di Brasil, klaim tersebut tampak meragukan. Data mengenai pendapatan per daerah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Brasília merupakan daerah dengan pendapatan tertinggi, mencapai R\$ 2.685,7. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan pendapatan daerah

termiskin di Brazil, yaitu Maranhão, yang hanya mencapai R\$ 635,5 (Ferrari, 2020). Selain itu, keberadaan Brasília juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah terdekatnya, seperti Tocantins (R\$ 1.055,6), Bahia (R\$ 912,8), dan Goiás (R\$ 1.306,3), yang bahkan tidak mencapai setengah dari pendapatan ibu kota negara tersebut (Ferrari, 2020).

Tingginya disparitas pendapatan antar daerah di Brazil mengindikasikan kegagalan strategi pemindahan ibu kota baru, yang oleh pemerintah Indonesia diklaim dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah (Saputra, 2022). Data tersebut juga menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota justru memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sejak keputusan pemindahan ibu kota, proyek pembangunan infrastruktur di Brazil lebih difokuskan pada ibu kota baru, yang mengakibatkan distribusi kekayaan dan pembangunan di wilayah lain menjadi sangat tidak merata (Kelly, 2020). Fenomena ini terjadi karena Brazil memusatkan upaya pembangunan mereka pada penyelesaian proyek ambisius tersebut.

Temuan lain yang menarik datang dari penelitian yang dilakukan oleh Grimes et al. (2017) yang menggunakan pendekatan *spatial difference in difference approach* dengan analisis data dalam rentang waktu 70 tahun (1939-2008) untuk melihat perbedaan *outcome* pembangunan Brasília, baik sebelum dan setelah didirikannya. Menariknya, temuan dari penelitian mereka melihat adanya perkembangan populasi sebelum dan sesudah berdirinya Brasília di beberapa wilayah pesisir barat dan pedalaman barat Brasília yang memang normal terjadi, mengingat hadirnya ibu kota baru pasti menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk. Namun yang mengejutkan, tidak ada bukti deskriptif maupun statistik yang menunjukkan dampak peningkatan pendapatan per kapita wilayah lainnya dari pembangunan Brasília, kecuali pada wilayah Brasília itu sendiri. Temuan ini sangat menarik, terutama untuk melihat masa depan IKN yang dipandang sebagai solusi disparitas wilayah oleh pemerintah Indonesia.

Dalam konteks ketimpangan penduduk, Brasil menempati posisi sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah yang paling parah di dunia (Almeida & Silva, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ferreira Lima dan Luis Cristovao (2013) mengungkapkan bahwa di antara sepuluh kota terbesar di Brasil, Brasília menunjukkan penurunan ketimpangan penduduk yang paling minimal. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah perbedaan signifikan dalam pendapatan antara penduduk distrik federal dan kota-kota satelit di sekitar Brasília. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan ekonomi Brasília sangat bergantung pada tingginya gaji pegawai negeri, pebisnis, dan politisi yang tinggal di kawasan-kawasan elit seperti Lago Sul (Diniz, 2014; Ferrari, 2020). Namun demikian, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri, pebisnis, dan politisi tersebut relatif kecil.

Mayoritas populasi di wilayah tersebut terdiri dari penduduk migran yang menetap di daerah-daerah satelit di sekitar ibu kota (De Sousa Filho dkk., 2022). Sayangnya, karena rendahnya kualifikasi mereka, peluang pekerjaan yang tersedia juga terbatas dengan tawaran gaji yang rendah, yang berkontribusi pada tingginya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut (Diniz, 2014: 94–95). Perbedaan mencolok antara gaji pegawai negeri, pejabat publik, dan politisi dengan pendapatan masyarakat umum di Brasília menempatkan ibu kota negara tersebut pada peringkat keenam belas di antara kota-kota dengan tingkat kesenjangan sosial tertinggi di dunia, serta posisi keempat di antara kota lainnya di Brasil (Diniz, 2014: 95). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan potensi ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan ibu kota baru, sebagaimana yang terjadi di Brasília.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Brasília, pembangunan IKN berpotensi menyebabkan penyingkiran sekitar 20.000 masyarakat adat dan 21 kelompok etnis dari wilayah yang telah mereka huni selama beberapa generasi, tanpa adanya solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini (Padawangi

& Perkasa, 2022). Penyingkiran tersebut tidak hanya mengakibatkan kehilangan tanah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap ketersediaan pangan yang selama ini dapat diakses oleh komunitas tersebut. Ancaman ini muncul sebagai akibat dari pembukaan lahan dan penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan yang memperoleh hak konsesi di wilayah tersebut (Susan dkk., 2022). Jika situasi ini terus berlanjut, masyarakat adat setempat beserta keanekaragaman dan karakteristik budaya mereka termasuk tradisi anyaman atap nipah yang menjadi identitas masyarakat di sekitar Sungai Sepaku—akan menghadapi risiko kepunahan (WRM, 2023). Fenomena ini mencerminkan pengalaman serupa yang dialami oleh masyarakat adat di wilayah Cerrado ketika proyek mega pembangunan ibu kota baru mulai dilaksanakan (Casado, 2021).

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENARIK INVESTOR DI IKN

Proses pemindahan ibu kota di Indonesia terdiri dari empat tahap strategis (Vernando, 2024). Tahap pertama (2020-2024) menekankan pembangunan infrastruktur utama, termasuk Istana Presiden, kementerian, perkantoran pemerintah, dan perumahan pendukung. Tahap ini bertujuan untuk membangun fondasi fisik bagi pusat pemerintahan yang baru. Tahap kedua (2025-2035) berfokus pada pengembangan pusat-pusat penelitian dan ekonomi berkelanjutan. Proses ini mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada penelitian dan pengembangan. Tahap ketiga (2035-2045) mencakup pengembangan infrastruktur di wilayah sekitar IKN, seperti Balikpapan dan Samarinda. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahap keempat (dimulai 2045) bertujuan untuk mengembangkan kota IKN menjadi salah satu dari sepuluh kota paling layak huni di dunia. Melalui perencanaan ini, pembangunan IKN merupakan visi jangka panjang untuk kota yang berkelanjutan dan inovatif (Vernando, 2024).

Dengan demikian, setiap tahap dari proses ini dirancang secara cermat untuk memastikan transisi yang mulus dan efektif menuju IKN.

Upaya untuk menghadirkan kota yang inovatif tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang ingin dicapai oleh pembangunan Brasília (Skidmore, 1999). Ibu kota baru yang dirancang oleh Oscar Niemeyer tersebut, awalnya dimaksudkan sebagai ruang baru yang memberikan tempat yang nyaman dengan fasilitas modern dan berorientasi hijau yang dimaksudkan untuk semua kelompok dan kelas dalam masyarakat (Wulandari & Koestoer, 2023). Namun seiring berjalannya waktu, kota tersebut menjadi ruang eksklusif bagi yang kaya, dan kaum miskin kota semakin terpinggirkan, bahkan memaksa mereka untuk keluar dari pusat kota ke daerah-daerah pinggiran yang tidak terencana, padat, dengan fasilitas infrastruktur dan layanan yang tidak memadai (De Sousa Filho dkk., 2022).

Apabila tidak dikelola dengan cermat, fenomena eksklusivitas ruang yang terjadi di Brasília berpotensi terulang di Ibu IKN. Pemerintah, melalui Otorita IKN, mengklaim bahwa pembiayaan IKN akan sangat bergantung pada investasi yang masuk. Sebagaimana diketahui, model pembiayaan IKN terdiri dari tiga metode, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (Vernando, 2024). Dari ketiga metode tersebut, terlihat bahwa sekitar 20 persen pembiayaan IKN akan menggunakan anggaran negara, sementara sisanya 80 persen akan bergantung pada investasi yang masuk. Bank Dunia merekomendasikan pengeluaran sebesar 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk investasi berkelanjutan pada seluruh infrastruktur negara (Ling, 2019). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik investor agar mengucurkan dananya di IKN, belum terlihat adanya aliran investasi signifikan dari investor asing untuk IKN. Jika kondisi ini terus berlanjut, solusi pembiayaan kemungkinan besar akan dibebankan kepada APBN, yang dapat mengakibatkan pengorbanan anggaran untuk sektor-sektor lainnya.

Selain itu, pemberian berbagai hak eksklusif oleh pemerintah kepada para investor berpotensi mengakibatkan IKN dikuasai oleh segelintir pihak tertentu. Dalam rangka menarik investasi di IKN, pemerintah telah menetapkan serangkaian insentif yang strategis. Salah satu inisiatif utama adalah pemberian *tax holiday*, yang menyediakan pengurangan atau bahkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi investor selama maksimum 30 tahun. Di samping itu, terdapat potongan pajak yang signifikan, yaitu sebesar 350 persen, untuk investasi yang difokuskan pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Pemerintah juga menawarkan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun serta Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 160 tahun (Alexander, 2024; Trend Asia & Forest Watch Indonesia, 2022). Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN juga menetapkan bahwa investor yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) diberikan hak pengelolaan tanah dengan jangka waktu hingga 190 tahun. Hak ini diberikan dalam dua tahap, masing-masing berdurasi 95 tahun. Apabila tahap pertama telah berakhir dan investor ingin melanjutkan, hak tersebut dapat diperpanjang untuk tahap kedua dengan durasi yang sama (Theodora, 2023).

Sementara hak eksklusif terkait Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu tahap dan bisa diperpanjang untuk tahap kedua dengan durasi yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun (Theodora, 2023). Revisi UU juga menetapkan bahwa tanah untuk pembangunan di IKN adalah salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan Hak Atas Tanah (HAT) di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian (CNN, 2023).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN berpotensi melegalkan monopoli tanah oleh pengusaha. Padahal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok Agraria secara tegas menekankan pentingnya pemerintah untuk mencegah praktik monopoli oleh pihak swasta. Hingga tahun 2024, terdapat 2.086 hektare lahan yang masih memiliki status bermasalah, di mana sebagian lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat cenderung tidak mencukupi. Salah satu kasus yang dijadikan contoh menunjukkan bahwa pemerintah hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp150 juta untuk lahan yang digunakan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, yaitu hanya sekitar 10% dari nilai tanah saat ini (BBC Indonesia, 2023).

Para investor juga ditawarkan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi, insentif fiskal, serta pengurusan izin melalui *Online Single Submission* (OSS), sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah untuk menarik investor di daerah lain (Trend Asia & Forest Watch Indonesia, 2022). Fasilitas-fasilitas ini berpotensi mengakibatkan hilangnya tidak hanya pendapatan dari penarikan pajak di IKN, tetapi juga kemungkinan besar pembukaan izin usaha secara sembarangan. Dengan demikian, IKN diperkirakan akan menjadi proyek yang menarik bagi pelaku bisnis besar yang memiliki kemampuan modal yang memadai untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

SKEMA PEMBIAYAAN YANG AKAN MEMBEBANKAN APBN

Dalam upaya mendanai kelima tahapan pembangunan IKN, pemerintah secara aktif mencari dan melibatkan investor dari luar negeri sebagai bagian integral dari strategi pendanaan dan pengembangan. Menurut pernyataan Presiden Jokowi, sejumlah investor, baik dari dalam maupun luar negeri, telah berpartisipasi dalam proyek IKN, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai tahap *groundbreaking*. Temuan kami menunjukkan, jumlah investor yang terlibat secara spesifik mencapai 21 (Susilo, 2023). Sebelumnya, pada tahun 2020, SoftBank menyatakan akan melakukan investasi di IKN dengan nilai US\$ 100 miliar. Namun, dua tahun kemudian, SoftBank membatalkan investasi

tersebut tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai alasan di balik keputusan itu. Janji investasi juga pernah dinyatakan oleh Uni Emirat Arab (UEA). Pemerintah, melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa UEA berminat untuk melakukan investasi di IKN dengan nilai US\$ 10 miliar atau sekitar Rp 142 triliun (Susanti et. al., 2023). Namun, hingga tahun 2023, belum ada penandatanganan kontrak komitmen kerja sama investasi di IKN.

Ketidakjelasan investasi yang dilakukan oleh investor telah memaksa Indonesia untuk mencari alternatif baru melalui skema pembiayaan APBN. Padahal, pada masa pra-pembangunan, Presiden Jokowi berjanji bahwa pembangunan Ibu Kota Baru tidak akan membebani APBN. Namun, janji ini tampaknya tidak lebih dari sekadar retorika belaka. Berdasarkan laporan 2022 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahap awal pembangunan memerlukan peningkatan anggaran APBN sebesar Rp7 - 8 triliun. Bahkan (Alaydrus, 2023). APBN bertanggung jawab atas 53% total biaya konstruksi, dan sisanya berasal dari sumber pendanaan meliputi kerja sama antara pemerintah dan Unit Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta (BBC Indonesia, 2022). Meskipun APBN hanya memiliki daya tampung sebesar Rp 5 triliun setiap tahunnya, proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tambahan akan mengalami peningkatan secara progresif setiap tahunnya.

Studi yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Indonesia tahun 2022, mengenai perspektif para ahli terhadap proyek IKN mengungkapkan beberapa temuan penting (CSIS Indonesia, 2022). Dalam studi tersebut, responden yang terdiri dari akademisi, peneliti, jurnalis, birokrat, dan politisi, memberikan pandangan mereka tentang proyek tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 58,8% responden merasa pesimis bahwa proyek IKN akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, sebanyak 69,4% responden berpendapat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak

akan cukup untuk mendanai proyek IKN. Selain itu, sebanyak 69,4% responden berpendapat bahwa Anggaran APBN tidak akan cukup untuk mendanai proyek IKN. Temuan ini menunjukkan adanya keraguan yang signifikan terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek IKN.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Andry Satrio Nugroho, pakar ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), telah memberikan penjelasan mendalam bahwa realisasi waktu penyelesaian proyek IKN mungkin tidak akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan kesamaan signifikan dengan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dampak yang mungkin muncul dari situasi ini adalah peningkatan biaya yang diakibatkan oleh penundaan dalam pelaksanaan operasional (BBC Indonesia, 2023). Di sisi lain, Yusuf Wibisono, Direktur *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS), telah melakukan analisis awal terhadap biaya proyek yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Prediksinya menunjukkan bahwa biaya ini akan mengalami eskalasi yang signifikan, serupa dengan yang terjadi pada proyek kereta cepat. Wibisono kemudian melakukan perhitungan terperinci dan menemukan bahwa dalam skenario terburuk, pembiayaan IKN akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Pemerintah harus mengalokasikan Rp 50 triliun dari APBN setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan, atau kurang lebih mencapai Rp 750 triliun (IDEAS, 2023).

Di sisi lain, laporan terbaru dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2024 mengungkapkan tantangan signifikan dalam pendanaan proyek IKN (Indonesian Corruption Watch, 2024). Pemerintah Indonesia menetapkan target investasi awal sebesar Rp100 triliun hingga tahun 2024. Namun, realisasi investasi hanya mencapai 20 persen dari target tersebut, yang sebagian besar berasal dari investor domestik (Indonesian Corruption Watch, 2024). ICW mengidentifikasi bahwa rendahnya minat investor asing disebabkan oleh iklim investasi yang kurang kondusif dan tingginya risiko korupsi. Kondisi ini mengakibatkan investor asing enggan menanamkan modal di proyek IKN. Sebaliknya, mayoritas proyek IKN dikerjakan

oleh BUMN. Dari sepuluh perusahaan yang memperoleh proyek terbesar, tujuh di antaranya adalah BUMN. Hingga saat ini, terdapat 106 proyek pengadaan yang sedang berjalan atau telah selesai dibangun, dengan 24 proyek di

antaranya terindikasi memiliki potensi korupsi (Indonesian Corruption Watch, 2024). Temuan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola dan transparansi untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mengurangi risiko korupsi.

Tabel 1. Perbandingan pemindahan ibu kota Indonesia dan Brazil

Negara	Alasan pemindahan ibu kota	Apakah tujuan utama pemindahan tercapai	Sumber dan skema pembiayaan yang digunakan	Dampak lain yang ditimbulkan
Indonesia	1. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Menumbuhkan pendekatan baru terhadap daerah tertinggal dan daerah pinggiran. 3. Memudahkan restrukturisasi Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. 4. Mencegah terjadinya guncangan sosial, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi urbanisasi.	Proses pembangunan telah memasuki tahap pertama. Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa tujuan utama IKN diperkirakan tidak akan terwujud. Selain itu, pemerataan ekonomi akan sulit direalisasikan, dan beban pembiayaan diperkirakan akan sangat membebani anggaran negara.	1. APBN 2. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 3. Kerja sama antara BUMN dan swasta 4. Pendanaan internasional mencakup dana dari lembaga bilateral atau multilateral, yang dapat berupa hibah atau dana talangan. 5. <i>Creative financing</i>, seperti <i>crowdfunding</i> dan dana filantropi.	Temuan awal mengindikasikan bahwa biaya yang tinggi berpotensi memberikan beban signifikan terhadap APBN serta dampak lainnya mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat.
Brazil	1. Membangun ibu kota yang modern. 2. Meningkatkan perekonomian Brasil. 3. Menghapus jejak kolonialisme Portugis. 4. Mengurangi kepadatan penduduk di ibu kota. 5. Membangun interkoneksi antar wilayah dan memindahkan pusat gravitasi ekonomi serta politik. 6. Mengurangi risiko serangan militer dari laut.	Pemindahan ibu kota Brasil telah selesai, namun belum berhasil mengatasi disparitas wilayah dan kesenjangan sosial. Sebaliknya, kota baru ini justru menambah masalah terkait isu urban dan ketimpangan ekonomi di Brasil.	Total dana pembangunan semuanya berasal dari anggaran pemerintah, baik melalui penerbitan mata uang maupun pinjaman. Pemerintah Brasil juga membangun sebuah perusahaan untuk mengawasi pembangunan Brasília dari awal hingga akhir, yaitu Novacap, yang masih beroperasi hingga saat ini.	Krisis ekonomi yang mengarah pada terjadinya krisis sosial serta penggulingan pemerintah Kubitschek.

Sumber: (Banerji, 2012; Bappenas, 2021; Illman, 2015; Mubaroq & Solikin, 2019; Vernando, 2024; CSIS Indonesia 2022; Susanti et. al., 2023; Alaydrus, H. 2023).

SIMPULAN

Pengalaman Brasil dengan ibu kota baru, Brasília, menunjukkan bahwa pemindahan tersebut tidak efektif dalam mengurangi disparitas wilayah dan justru memperlebar kesenjangan ekonomi. Data menunjukkan bahwa Brasília memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, dengan infrastruktur yang lebih difokuskan pada ibu kota, sehingga meninggalkan daerah lain dalam ketertinggalan. Kekhawatiran serupa juga muncul dalam konteks pemindahan ibu kota di Indonesia. Potensi dampak negatif terhadap masyarakat adat di Indonesia yang mungkin diakibatkan oleh pemindahan ibu kota baru menimbulkan kekhawatiran. Penyingkiran komunitas adat dan ancaman terhadap keberlanjutan budaya serta akses pangan menjadi isu yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, terdapat risiko bahwa model pembiayaan yang sangat bergantung pada investasi swasta dapat menyebabkan eksklusivitas ruang, serupa dengan pengalaman di Brasília, di mana kelompok-kelompok kaya mendominasi kota, sementara masyarakat miskin terpinggirkan. Pemberian hak eksklusif kepada investor serta potensi terjadinya monopoli tanah juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika pengelolaan tidak dilakukan secara hati-hati, IKN berisiko menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sekaligus mengabaikan kebutuhan masyarakat luas dan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada menarik investasi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam proses perencanaan dan implementasinya.

Selain itu, tantangan dalam pendanaan proyek IKN juga perlu diperhatikan. Meskipun pemerintah Indonesia aktif berupaya menarik investasi asing, sejumlah investor telah menunjukkan keraguan, bahkan membatalkan komitmen investasi mereka. Situasi ini memaksa pemerintah untuk bergantung pada APBN, yang bertentangan dengan janji awal untuk tidak membebani APBN. Hasil penelitian

menunjukkan adanya optimisme yang tinggi di kalangan pakar mengenai potensi keberhasilan dan kelayakan proyek IKN, dengan mayoritas responden menyatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain itu, tantangan terkait korupsi dan tata kelola yang buruk telah mengakibatkan rendahnya minat investor asing, sehingga sebagian besar proyek IKN dikelola oleh BUMN. Berbagai macam permasalahan Brasil dalam proses pendirian Brasília haruslah memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam melaksanakan proyek IKN. Besarnya biaya pembangunan Brasília nyatanya menyebabkan permasalahan ekonomi dan ketidakstabilan politik di Brasil kala itu. Dengan demikian, pengalaman Brasil dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola proyek IKN agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

PUSTAKA ACUAN

- Alexander, H. B. (2024). *Pemerintah Tebar 9 Insentif Pajak bagi Investor di IKN, Ini Detailnya*. Diakses dari https://ikn.kompas.com/read/2024/05/31/071456587/pemerintah-tebar-9-insentif-pajak-bagi-investor-di-ikn-ini-detailnya?page=all#google_vignette pada tanggal 24 September 2024
- Almeida, R. V., & Silva, C. A. M. (2021). Inequality and Well-Being in the Brazilian Metropolitan Areas. *International Union for the Scientific Study of Population*.
- Alaydrus, H. (2023). *Anggaran IKN Bengkulu, PUPR Minta Tambahan Rp 7 T Tahun ini*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321185637-4-423673/anggaran-ikn-bengkak-pupr-minta-tambahan-rp-7-t-tahun-ini> pada tanggal 17 September 2024
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346–354. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>
- Anditya, A. W., & Khairuummah, R. (2022). Meninjau Potensi Keberadaan Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Baru. In L. Agustino & J. Silas (Eds.), *Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik Indonesia* (1st ed., pp. 63–85). PT. Tubagus Lima Korporat.

- Andrade, R. de P. (2019). Vencidas a distância e floresta!: A Transbrasiliana e a Amazônia desenvolvimentista (Defeated in distance and forest!: Transbrasiliana and the developmental Amazon). *Tempo*, 25(2), 363–381. <https://doi.org/10.1590/tem-1980-542x2019v250204>
- Banerji, R. (2012). *Niemeyer's Brasília: Does it work as a city?* diakses dari <https://www.bbc.com/news/magazine-20632277> pada tanggal 24 September 2024
- Bappenas. (2021). Handbook of the Relocation of Indonesia's Capital City. In *Kementrian PPN/Bappenas*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- BBC Indonesia. (2022). *Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut 'akan korbakan program masyarakat'* diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821> pada tanggal 20 September 2024
- Betria, I., & Raju, C. S. (2018). Society Perception Toward Replacement Government Center From Kuala Lumpur to Putrajaya Malaysia. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 2(2), 73–79. <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v2i2.155>
- Blewitt, J. (2017). *Understanding Sustainable Development*. Routledge. <https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315465852>
- Campante, F. R., Do, Q.-A., & Guimaraes, B. (2019). Capital Cities, Conflict, and Misgovernance. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(3), 298–337. <https://doi.org/10.1257/app.20170111>
- Casado, L. (2021). *Indigenous in Brasília: The fight for rights in Brazil's power base* diakses dari <https://news.mongabay.com/2021/05/indigenous-in-brasil-ia-the-fight-for-rights-in-brazils-power-base/> pada tanggal 9 April 2024
- CNN. (2023). *UU IKN Baru: Investor Bisa "Kuasai" Lahan di IKN Sampai 190 Tahun* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231003141314-92-1006556/uu-ikn-baru-investor-bisa-kuasai-lahan-di-ikn-sampai-190-tahun> pada tanggal 22 September 2024
- CSIS Indonesia. (2022). *Rilis Survei Ahli Pemindahan Ibukota Negara: Prospek kepemimpinan Jakarta dan implikasi sosial, politik dan ekonomi ke depan* diakses dari [https://csis.or.id/event/rilis-survei-ahli-pemindahan-ibukota-negara-prospek-kepemimpinan-jakarta-dan-](https://csis.or.id/event/rilis-survei-ahli-pemindahan-ibukota-negara-prospek-kepemimpinan-jakarta-dan-implikasi-sosial-politik-dan-ekonomi-ke-depan)
- [https://csis.or.id/event/rilis-survei-ahli-pemindahan-ibukota-negara-prospek-kepemimpinan-jakarta-dan-](https://csis.or.id/event/rilis-survei-ahli-pemindahan-ibukota-negara-prospek-kepemimpinan-jakarta-dan-implikasi-sosial-politik-dan-ekonomi-ke-depan/)
- implikasi-sosial-politik-dan-ekonomi-ke-depan/ pada tanggal 20 September 2024
- De Sousa Filho, J. F., dos Santos, G. F., Andrade, R. F. S., Paiva, A. S., Freitas, A., Castro, C. P., de Lima Friche, A. A., Barber, S., Caiaffa, W. T., & Barreto, M. L. (2022). Inequality and income segregation in Brazilian cities: a nationwide analysis. *SN Social Sciences*, 2(9), 191. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00491-9>
- De Vries, W. T. (2021). Urban Greening for New Capital Cities. A Meta Review. *Frontiers in Sustainable Cities*, 3. <https://doi.org/10.3389/frsc.2021.670807>
- Diniz, C. (2014). *The Luxury Market in Brazil*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137432568>
- Emas, R. (2015). *The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34980.22404>
- Epstein, D. (1973). *Brasília, Plan and Reality: A Study of Planned and Spontaneous Urban Development*. University of California Press,
- Farida, F. (2021). Indonesia's capital city relocation: A perspective of regional planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 221–234. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.12013>
- Ferrari, H. (2020). *Brasilia has a Neighborhood with European Income and Region as Poor as Africa* diakses dari <https://www.poder360.com.br/brasilia-60-anos/brasilia-tem-bairro-com-renda-europeia-e-regioes-tao-pobres-como-a-africa/> pada tanggal 10 April 2024
- Fischer, M., Foord, D., Freccè, J., Hillebrand, K., Kissling-Näf, I., Meili, R., Peskova, M., Risi, D., Schmidpeter, R., & Stucki, T. (2023). The Concept of Sustainable Development. In *Sustainable Business: SpringerBriefs in Business* (pp. 17–27). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25397-3_2
- Gordon, D. (2006). *Planning Twentieth Century Capital Cities*. Routledge
- Grimes, A., Matlaba, V. J., & Poot, J. (2017). Spatial impacts of the creation of Brasília: A natural experiment. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49(4), 784–800. <https://doi.org/10.1177/0308518X16684519>
- Hance, J. (2020). *Cerrado: Brazil's tropical woodland* diakses dari <https://worldrainforests.com/cerrado/> pada tanggal 10 April 2024

- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. In *Dekonstruksi* 3(01).
- Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. *Sustainable Development*, 13(1), 38–52. <https://doi.org/10.1002/sd.244>
- IDEAS. (2023). *Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN* diakses dari <https://ideas.or.id/2023/11/02/ekonom-ingatkan-anies-ganjar-dan-prabowo-melanjutkan-ikn-beban-berat-apbn/> pada tanggal 15 September 2024
- Illman, E. (2015). *Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications*. Charles University.
- Indonesian Corruption Watch. (2024). Membongkar Masalah Pembangunan Ibu Kota Negara diakses dari https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024-04-26_icw-ikn-opentender.pdf pada tanggal 10 September 2024
- Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., & Wijaya, A. K. (2023). Forecasting The Development of IKN (New National Capital) in Sustainable Development, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16786>
- Kelly, J. (2020). The City Sprouted. *Consilience*, 22, 73–85.
- Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics and Business*, 21(1), 67–94. <https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005>
- Lima, F., & Cristovao, L. (2013). *The Persistent Inequality in the Great Brazilian Cities: The Case of Brasília the Persistent Inequality In The Great Brazilian Cities: The Case Of Brasília* (Issue 50938).
- Ling, A. (2019). *Brasília: uma cidade que não faríamos de novo* diakses dari <https://caosplanejado.com/brasilia-uma-cidade-que-nao-fariamos-de-novo/> pada tanggal 11 April 2024
- Mae. (2023). *Meneropong Nasib IKN di Tangan Presiden Baru* diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231122112806-128-491028/meneropong-nasib-ikn-di-tangan-presiden-baru> pada tanggal 19 September 2024
- Mahatma, R. (2022). *Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN): Belajar dari Brasil* diakses dari <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/03/03/perpindahan-ibu-kota-negara-ikn-belajar-dari-brasil> pada tanggal 9 Maret 2024
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Mubaroq, M., & Solikin, A. (2019). Review on the Financing Scheme of Indonesia's Capital City Relocation Plan: Lessons Learned from Brazil, Malaysia, and Tanzania. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Finance Economics and Business, ICOFEB 2018, 12-13 November 2018, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288767>
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jf.49109>
- Myoe, M. A. (2006). *The Road to Naypyitaw: Making Sense of the Myanmar Government's Decision to Move its Capital* (79).
- Padawangi, R., & Perkasa, A. (2022). *Nusantara dan Perebutan Ruang Hidup di IKN* diakses dari <https://projectmultatuli.org/nusantara-dan-perebutan-ruang-hidup-di-ikn/> pada tanggal 11 April 2024
- Parulihan, S. (2019). *FMB 9 Pindah Ibu Kota Negara: Indonesia Belajar dari Pengalaman Brasil Pindahkan Ibu Kota Negara Ke Brasilia*.
- Pinto, P. S. (2020). *Construction of Brasilia Cost US\$ 1.5 Billion in 1960 Value* diakses dari <https://www.poder360.com.br/brasilia/construcao-de-brasilia-custou-uss-1-5-bilhao-em-valor-de-1960/> pada tanggal 10 April 2024
- Populicenter. (2021). *Kesenjangan Pembangunan Antara Jawa dan Luar Jawa* diakses dari <https://populicenter.org/2021/03/02/kesenjangan-pembangunan-antara-jawa-dan-luar-jawa/> pada tanggal 20 September 2024
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14(3), 681–695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Quistorff, B. (2015). Capitalitis? Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2588620>

- Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., Permatasari, F. D., & Rohmah, A. A. (2021). Best Practices of Capital City Relocation in Various Countries: Literature Review. *E3S Web of Conferences*, 325, 07004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132507004>
- Mulyaningrum, R. (2023). Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*, 82–105. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201>
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/jscsl.v8i1.54443>
- Rosenberg, M. (2019). *Germany's Capital Moves From Bonn to Berlin* diakses dari <https://www.thoughtco.com/germany-capital-from-bonn-to-berlin-1434930> pada tanggal 9 Maret 2024
- Saputra, D. A. (2022). *Pemindahan IKN sebagai Upaya Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/30630/Pemindahan-IKN-sebagai-Upaya-Pertumbuhan-dan-Pemerataan-Pembangunan-Indonesia.html> pada tanggal 10 April 2024
- Saputra, D. S., J. T. G., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 7(2).
- Shoumatoff, A. (1990). *The capital of hope : Brasília and its people*. Vintage Books.
- Skidmore, T. E. (1999). *Brazil: Five Centuries of Changes*. Oxford University Press.
- Sugiarto, E. C. (2022). *IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City* diakses https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city pada tanggal 10 April 2024
- Sumarno. (2020). Pembelajaran dari Malaysia dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *JA Political Science*.
- Susan, A., Rijanta, Saputra, E., Kumalawa, R., Giffari, R. A., Larasa, B., Wardatuoyyibah, Musthofa, A., Pratomo, R. A., Budiman, P. W., Raharjo, J. T., Ali, S. D., Reinhart, H., & Yuliar, A. (2022). *Following Frontiers of the "Forest City": Profiling Ibu Kota Nusantara*. Mega Cakrawala.
- Susilo, N. (2023). *Presiden Jokowi Sebut 21 Investor Segera Bangun IKN*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/17/presiden-jokowi-sebut-21-investor-masuk-ikn> pada tanggal 16 Juli 2024
- Theodora, A. (2023). *Hak atas Tanah di IKN "Diobral" 190 Tahun, Bisa Jadi Bumerang Investasi* diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/08/hgu-di-ikn-diobral-190-tahun-bisa-jadi-bumerang-investasi> pada tanggal 20 September 2024
- Todaro, M. P., Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Trend Asia & Forest Watch Indonesia. (2022). *Ibu Kota Nusa-Investor: Cara Pemerintahan Jokowi Melobi Pendanaan IKN* diakses dari <https://projectmultatuli.org/ibu-kota-nusa-investor-cara-pemerintahan-jokowi-melobi-pendanaan-ikn/> pada tanggal 11 April 2024
- Vernando, Z. (2024). *Sekilas terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Kenapa dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)?* diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn> pada tanggal 11 April 2024
- Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A., & Wright, T. (2011). Sustainable Development: A Bird's Eye View. *Sustainability*, 3(10), 1637–1661. <https://doi.org/10.3390/su3101637>
- Wibowo, K. P., Pangestuty, W.R. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan di Indonesia*. *Journal of Development and Social Economic Studies*, 2(3), 539-549.
- WRM. (2023). *New Capital Cities, Deforestation and Social Apartheid: Parallels Between Brazil and Indonesia* diakses dari <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/new-capital-cities-deforestation-and-social-apartheid-parallels-between-brazil-and-indonesia> pada tanggal 10 April 2024
- Wulandari, D. A., & Koestoer, R. H. S. (2023). Planning Comparison for the Capital City Relocation between Brazil and Indonesia. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 2(06). <https://doi.org/10.58806/ijssshr.2023.v2i6n12>

Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, & Verrence Wibowo. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>

Yusuf, A. A., Roos, E. L., Horridge, J. M., & Hartono, D. (2023). Indonesian capital city relocation and regional economy's transition toward less carbon-intensive economy: An inter-regional CGE analysis. *Japan and the World Economy*, 68, 101212. <https://doi.org/10.1016/j.japwor.2023.101212>